JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1876-1880
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2726

Peran Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Edukasi Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah Pesisir Pantai Pandeglang - Banten

Yuningsih, Wika Hardika Legiani, Febrian Alwan Bahrudin
Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pedidikan
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Correspondence email: 2286170035@untirta.ac.id, wikahardikalegiani@gmail.com, febrian.alwan@unitirta.ac.id

Abstrak. Indonesia terdiri dari 3 lempeng tektonik, yaitu lempengan pasifik, indo-australia dan lempengan Eurasia. 3 lempengan ini saling bertabrakan yang dapat mengakibatkan gempa bumi bahkan tsunami, berdasarkan data BNPB, dalam indeks resiko bencana Indonesia (IRBI) provinsi banten termasuk dengan kelas resiko tinggi bencana termasuk bencana tsunami. Lokasi penelitian ini berada di SMA Negeri 3 Pandeglang dan SMA Negeri 15 Pandeglang yang berada di pesisir pantai yang rawan rentan terhadap bencana tsunami. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hubungan kerjasama pemerintah dengan pihak sekolah dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pemerintah dapat menunjukkan peranannya dalam penanggulangan bencana melalui 4 (empat) cara, yaitu cara legislasi, kelembagaan, perencanaan, dan pengembangan kapasitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini BPBD Kabupaten Pandeglang telah cukup berhasil dalam Edukasi Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah Pesisir Pantai Pandeglang Banten. Pada pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mempunyai dasar hukum dan juga mampu mengembangkan strategi mitigasi bencana di sekolah berupa membuat Sekolah Tangguh Bencana (STB) dan pembentukan satuan tugas Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) Kabupaten Pandeglang.

Kata kunci: Peran Pemerintah; Penanggulangan Bencana; Mitigasi Bencana.

Abstract. *Indonesia is located between 3 tectonic plates, which are the Pacific plate, the Indo-Australian plate, and the Eurasian plate. These 3 plates can collide with each other and can cause earthquakes and tsunamis, based on BNPB data, and in the Indonesia Disaster Risk Index (known as IRBI), Banten province is included in the high-risk class for disasters, including tsunami disasters. The location of the current research was carried out at SMA Negeri 3 Pandeglang and SMA Negeri 15 Pandeglang which were on the coast that were prone to tsunami disasters. The purpose of this study was to describe the relationship between government and schools in tsunami disaster preparedness. This study used a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques consisted of observation, interviews and documentation. Based on the research results, it is known that the government could demonstrate its role in disaster management through 4 (four) ways, which were legislation, institutions, planning, and capacity building. The results showed that the Pandeglang Regency Government in this case the Pandeglang Regency BPBD was quite successful in Tsunami Disaster Mitigation Education at the Pandeglang Coastal School Banten. In carrying out disaster risk reduction efforts, the Pandeglang Regency Government had a legal basis and was also able to formulate disaster mitigation strategies in schools, which were the establishment of Disaster Resistant Schools (known as STB) and the formation of the Pandeglang Regency Regional Disaster Management Task Force (known as PBD.*

Keywords: *Government Role; Disaster Management; Disaster Mitigation.*

PENDAHULUAN

Lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia adalah tiga lempeng tektonik utama yang membentuk Indonesia. Pada waktu tertentu, tiga lempengan ini saling bertabrakan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan bahkan menyebabkan bencana Tsunami. Berdasarkan data BNPB (2013), dalam indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) Provinsi Banten termasuk dengan kelas Risiko tinggi bencana. Karena di delapan (8) Kabupaten Kota yang tersebar di Provinsi Banten, enam (6) diantaranya termasuk dalam kategori Risiko tinggi bencana. Di provinsi banten terdapat salah satu daerah yang rentan terhadap resiko bencana tinggi yaitu salah satunya kabupaten Pandeglang dengan skor 215. Salah satu bencana yang terjadi di provinsi banten tepatnya di wilayah Pandeglang yaitu terjadinya Tsunami di Desember 2018 lalu menegaskan bahwa daerah tersebut berisiko tinggi terhadap ancaman tsunami. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa Selat Sunda mengalami banyak sekali Tsunami seperti letusan gunung berapi dan gempa bumi. Tsunami dipicu oleh beberapa peristiwa geologis, antara lain letusan gunung Krakatau pada tahun 416, 1883, dan 1928, serta gempa bumi pada tahun 1851, 1883 dan 1889. Data tersebut berdasarkan data IRB.

Pada 2018 tsunami terjadi di Selat sunda yang mengakibatkan kerusakan cukup parah pada ruang publik tak terkecuali pada sarana pendidikan di pesisir pantai kabupaten pandeglang. Tercatat data BPBD Kabupaten Pandeglang bahwa sekolah yang terdampak bencana tersebut berjumlah 16 sekolah dari tingkatan paling bawah sampai sekolah menengah atas. Sekolah-

sekolah di pesisir pandeglang sudah sepatutnya menerapkan standar tinggi pada sarana dan pra sarana penunjang keselamatan warga sekolah seperti pada Peraturan Kepala (PERKA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 04 Tahun 2012 menjelaskan bahwa "Sekolah tahan bencana yaitu sekolah yang menerapkan standar tinggi pada sarana dan prasarananya serta budaya yang melindungi warga sekolah dan lingkungan sekitar dari kemungkinan terjadinya bencana". Fasilitas sarana dan prasarana tersebut meliputi gedung sekolah, peralatan tanggap bencana milik sekolah, dan pengetahuan warga sekolah seperti pendidikan pengetahuan kebencanaan, simulasi kebencanaan, dan standar operasional prosedur (SOP) penanggulangan bencana.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya harus memberikan pengetahuan, tetapi juga harus mampu membekali siswa dengan keterampilan dan keterampilan bertahan hidup ketika mereka memasuki masyarakat. Mitigasi bencana adalah komponen dari kemampuan bertahan hidup siswa di masa depan. jadi edukasi mitigasi bencana sejak dini pada siswa mutlak diperlukan, mengingat mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam mewujudkan masyarakat sadar bencana. Maka pendidikan mitigasi bencana sangat diperlukan, sehingga masyarakat tidak lagi panik saat terjadi bencana alam karena mereka sudah mengetahui cara menyelamatkan diri dan mengambil langkah awal yang diperlukan.

Upaya pendidikan mitigasi bencana di sekolah memang perlu diperhatikan mengingat sekolah-sekolah di sepanjang pesisir pantai barat Kabupaten Pandeglang rentan akan terjadinya bencana selain sebagai bentuk pemberdayaan pada siswa yang kelak terjun langsung dalam bermasyarakat juga investasi mewujudkan masyarakat sadar bencana di Kabupaten Pandeglang. Dalam PP No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menjelaskan "Mitigasi bencana adalah upaya pengurangan risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun melalui kesadaran dan juga peningkatan kapasitas menghadapi bencana alam". Konsekuensi dari bencana jelas mengancam keselamatan warga sekolah bahkan masyarakat luas. Oleh sebab itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk penanggulangan, penanganan, dan pencegahan. Dengan kata lain, pemerintah perlu berpartisipasi langsung dalam upaya penanggulangan bencana di sekolah-sekolah, sebab bencana bukanlah masalah pribadi, tetapi berkaitan keselamatan umum.

SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 15 Pandeglang merupakan sekolah yang memiliki kerentanan tinggi dalam menghadapi ancaman bencana tsunami karna terletak di pesisir pantai barat kabupaten Pandeglang. Maka peran pemerintah Kabupaten Pandeglang harus fokus dalam perencanaan kesiapsiagaan yaitu mitigasi bencana di sekolah. Upaya kesiapsiagaan bencana di sekolah ditentukan melalui parameter kesiapan sekolah dalam menyusun tataruang, alur jalur evakuasi dan terakhir cukupnya pengetahuan warga sekolah dalam kondisi kedaruratan. Upaya mitigasi bencana seringkali dapat dibagi menjadi kategori non-struktural dan struktural. Membangun struktur fisik merupakan salah satu contoh mitigasi struktural, sedangkan mitigasi non struktural berfokus pada kesiapan masyarakat terhadap bencana alam melalui perencanaan tata guna lahan, peraturan pemerintah, dan pendidikan. (Rusilowati, 2012).

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa "Program tanggap bencana, yaitu serangkaian program yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana dengan mengorganisir dan mengambil langkah yang tepat dan efektif. Konsep kesiapsiagaan digunakan untuk lebih menitikberatkan pada kemampuan bertindak dalam merespon situasi darurat jika terjadi bencana secara cepat dan tepat". (Lipiunesco/Isdr, 2006). Selain itu, tentunya harus ada strategi yang digunakan pemerintah dalam kesiapsiagaan terhadap bencana alam, yang dalam kenyataannya sering dipandang sebagai force majeure, yaitu sesuatu di luar kendali manusia, sehingga dapat mengurangi terjadinya lebih banyak korban bencana alam tsunami di Kabupaten Pandeglang, diperlukan strategi kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, diadakannya Penelitian ini bermaksud untuk memahami dan menganalisis peran dan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam Pendidikan Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah Pesisir Pantai Pandeglang – Banten

METODE

Pengumpulan data untuk penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 3 Pandeglang, SMA Negeri 15 Pandeglang beserta BPBD Kabupaten Pandeglang. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada bulan November sampai September 2021. Penelitian ini menggunakan strategi dokumentasi, observasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data. Pendekatan Miles dan Huberman digunakan dalam analisis data penelitian ini, yang meliputi empat tahap:pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan triangulasi sumber untuk memvalidasi data.

HASIL

Strategi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Edukasi Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah Pesisir Pantai Pandeglang – Banten

Berdasarkan hasil Wawancara dan observasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang. BPBD diketahui telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. BPBD Kabupaten Pandeglang telah menyusun sejumlah kebijakan terkait penanggulangan bencana tsunami.

Salah satunya yaitu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggeser model penanggulangan bencana dari model tanggap bencana ke model pencegahan bencana. Ulum (2013), menjelaskan bahwa mitigasi bencana dibagi menjadi dua kategori, mitigasi struktural berupa pembangunan infrastruktur dan mitigasi non-struktural berupa berbagai regulasi tentang kesiapsiagaan, dan pelatihan Mitigasi Bencana.

Pengurangan risiko bencana merupakan langkah awal BPBD Kabupaten Pandeglang. Dampak negatif tsunami yang diprediksikan adalah jatuhnya lebih banyak korban jiwa, rusak beratnya fasilitas umum dan tentunya akses yang sulit di jangkau di sepanjang pantai Kabupaten Pendeglang. BPBD mengambil langkah-langkah strategis sebagai bagian dari persiapan penanganan keadaan darurat dan imelakukan kegiatan mitigasi. Ada beberapa bidang yang perlu dikaji dan menjadi perhatian peneliti pada Pendekatan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Edukasi Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah Pesisir Pantai Pandeglang – Banten yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang seperti landasan hukum *(legal standing)*, strategi edukasi mitigasi bencana, dan hubungan antar lembaga terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Landasan Hukum
   Pemerintah Kabupaten Pandeglang memilik 2 (dua) hukum di tingkat daerah berupa PERDA dan PERBUP sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Pandeglang.
   a. PERDA Kabupaten Pandeglang No 05 Tahun 2012 tentang Kewenangan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang. Perda tersebut merupakan tindak lanjut dari lahirnya UU di tingkati nasional, yaitu UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Mengenai organisas dan tatakerja BPBD Kabupaten Pandeglang, dijelaskan bahwa mitigasi bencana merupakan rangkaian upaya pengurangan risiko bencana melalui serangkaian program pembangunan baik fisik maupun non fisik serta edukasi dan peningkatan pengetahuan dalam merespon bencana. Sedangkan pada tahap kesiapsiagaan difokuskan pada rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan mengorganisir dan memprediksi bencana melalui langkah-langkah yang tepat dan efektif.
   b. PERBUP Kabupaten Pandeglang No 17 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana (RPKB) di Kabupaten Pandeglang. RPKB ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten mempersiapkan diri dalam merespon secara cepat dan efektif keadaan darurat yang timbul dari berbagai ancaman bencana melalui kerangka yang sejalan dengan penetapan strategi pemerintah daerah untuk bersama-sama mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan situasi yang terkena dampak darurat, terlepas dari jenis, tingkat, intensitas atau kompleksitas keadaan darurat.
2. Pengurangani Risiko Bencana Tsunami melalui Strategi Edukasi Mitigasi Bencana.
   Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah membuat Sekolah Tangguh Bencana (STB) dan sudah di rekomendasikan pada Dinas Pendidikan untuk memasukan pada kurikulum sekolah khususnya sekolah yang wilayahnya rawan bencana termasuk pesisir pantai kabupaten pandeglang. BPBD Kabupaten Pandeglang dalam edukasi mitigasi bencana Tsunami pertama inventarisir lokasi atau daerah yang paling rawan terjadainya bencana atau terdampak bencana ini melalui tugas dan fungsinya sesuai dengan PERDA No 05 Tahun 2012 tentang BPBD. Kedua, mengadakan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lokasi atau wilayah pesisir pantai yang merupakan lokasi dengan kerentanan tinggi terhadap bencana khususnya tsunami yaitu sekolah atau sekitar sekolah yang ada di pesisir pantai. Kemudian membuat atau mengintruksikan sarana dan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan korban jiwa akibat bencana.
3. Koordinasi Antar Aktor/Lembaga
   Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan BPBD Kabupaten Pandeglang Tanpa kolaborasi dengan semua mitra atau pihak yang ada, yang terlibat secara langsung dalam mitigasi dan kesiapsiagaan, hasil yang baik tidak dapat dicapai. Karena bencana merupakan masalah penting yang semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama. Implementasi dari kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pandeglang telah di bentuk satuan tugas Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) Kabupaten Pandeglang yang di isi oleh Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupateni Pandeglang terdiri dari Bupati, DPRD, KAPOLRES, DANDIM, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan DANREM.

Kesiapsiagaan SMA Negeri 3 Dan SMA Negeri 15 Pandeglang dalam Pengurangan risiko Bencana Tsunami

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah banyaknya korban jiwa bencana alam melalui pengorganisasian dan tindakan yang tepat dan efektif. (UU No. 24 Tahun 2007).

1. Kesiapsiagaan Bencana dan Mitigasi Bencana
   Pendidikan pencegahan bencana di sekolah sangat penting, namun perhatian pemerintah terhadap pendidikan pencegahan bencana di sekolah masih sangat rendah. Bahkan, bila dibandingkan dengan beberapa negara lain yang sudak memasukan pendidikan kesiapsiagaan pada kurikulum di semua tingkatan sekolah Indonesia masih kalah jauh, bila

dibandingkan dengan negara-negara seperti Bangladesh, Iran, India, Mongolia, Filipina, Turki dan Tonga. Pelatihan sekolah seharusnya berfokus pada prosedur Evakuasi darurat dan perlindungan korban jika terjadi bencana alam. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menekankan arus informasi dari pihak yang berwenang supaya tidak adanya misinfomasi yang bisa membuat kegaduhan di tempat evakuasi ketika terjadinya bencana.

Nurjanah dkk (2012:52), mengungkapkan bahwa pendidikan dan pelatihan dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi bencana sebagai langkah mengurangi risiko kecelakaan bencana, termasuk memberikan pelatihan kedaruratan kepada siswa yang tinggal dan sekolah di lokasi rawan bencana. Jelas bahwa pendidikan kesiapsiagaan bencana penting untuk semua lapisan masyarakat Indonesia bukan hanya siswa, tetapi siswa merupakan orang yang paling cepat menerima informasi atau pengetahuan baru dan mampu mengaktualisasikan secara cepat dan tepat. Hal tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan masyarakat sadar bencana. Upaya mitigasi bertujuan untuk dilaksanakan semaksimal mungkin dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengurangi risiko bencana, mengurangi korban jiwa dan meminimalkan dampak. Jika sudah ada pembahasan tentang mitigasi, maka pendidikan kebencanaan harus diselenggarakan di sekolah-sekolah. Tekankan kembali pentingnya mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana di sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan meminimalkan dampak bencana alam yang tidak terduga dengan mempersiapkan mereka untuk merespon sebelum atau saat terjadinya bencana. Mengarah pada kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara efektif ketika terjadi bencana.

2. Sarana Prasarana Penunjang menghadapi Ancaman Bencana

   Pada PERKA BNPB Nomor 17 Tahun 2009 MENJELASKAN bahwa pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan bencana, serta evakuasi bencana diperlukan alat yang memadai guna menopang aktivitas dan tentunya sesuai dengan kejadian bencananya. BPBD Kab. Pandeglang telah memiliki sumber daya yang melipah khususnya pada sarana dan prasarana telah cukup baik dan dalam keadaan yang cukup pula guna menghadapi risiko bencana. Selain itu, alat-alat yang gunakan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang untuk kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan peralatan yang terbilang lengkap dari alat berat sampai alat-alat pertolongan pertama pada keadaan kedaruratan termasuk sarana komunikasi. Sehingga dengan adanya peralatan tersebut pelaksanaan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana mampu diformulasikan secara optimal.

Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan pihak Sekolah dalam Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Tsunami

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan BPBD Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaanya tidak akan berjalan baik tanpa bekerjasama dengan pihak sekolah serta seluruh pemangku kepentingan yang ada. Sebab, bencana merupakan masalah penting yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Seperti yang di ungkapkan Nurjannah, dkk (2012:43) bahwa mereka yang terlibat dalam mitigasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana harus bekerjasama dan menyeimbangkan pemahaman antar lini sehingga proses penanggulangan bencana mampu berjalan dengan tepat dan efisien.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Edukasi Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah Pesisir Pantai Pandeglang Banten (Study Deskriptif di SMAN 3 Pandeglang dan SMAN 15 Pandeglang) telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dengan pebuh tanggung jawab. BPBD Kabupaten Pandeglang selaku penanggung jawab pelaksana telah dan mampu merumuskan Beberapa strategi penanggulangan bencana khususnya tsunami di kabupaten Pandeglang, dengan cara merubah pemahaman dan role model penanggulangan bencana dari model tanggap darurat menjadi model pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu strategi dan program BPBD Kabupaten Pandeglang.

Dampak negatif tsunami yang diprediksikan adalah jatuhnya lebih banyak korban jiwa, rusak beratnya fasilitas umum dan tentunya akses yang sulit di jangkau di sepanjang pantai Kabupaten Pendeglang. Langkah-langkah yang diambil BPBD berasal dari : strategi dan persiapan penanganan situasi tanggap darurat. Mengenai beberapa komponen yang telah di implementasikan: pada Strategi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Edukasi Mitigasi Bencana Tsunami di Sekolah Pesisir Pantai Pandeglang – Banten yang telah dilaksanakan BPBD Kabupaten Pandeglang yaitu produk hukum *(Legal Standing)*, dan mengubah pola strategi penanggulangan bencana menjadi kesiapsiagaan menghadapi bencana. Model kesiapsiagaan yang di fokuskan merupakan langkah yang strategis mengingat pendidikan mitigasi bencana khususnya di sekolah sekolah yang belum mempunyai kurikulum khusus merupakan langkah yang tepat dan selanjutnya yaitu koordinasi antar aktor atau lembaga yang berkaitan dengan kebencanaan.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah membuat Sekolah Tangguh Bencana (STB) dan telah di masukan pada dalam kurikulum sekolah khususnya

sekolah-sekolah yang lokasi atau wilayahnya rawan terhadap kemungkinan terjadinya bencana di kabupaten pandeglang. BPBD Kabupaten Pandeglang dalam edukasi mitigasi bencana Tsunami strateginya yang pertama yaitu inventarisir lokasi atau daerah yang paling rawan terjadinya bencana atau terdampak bencana sesuai dengan PERDA No 5 Tahun 2012 tentang tugas dan fungsi BPBD. Kedua, mengadakan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lokasi atau wilayah pesisir pantai yang merupakan lokasi dengan kerentanan tinggi terhadap bencana khususnya tsunami yaitu sekolah atau sekitar sekolah yang ada di pesisir pantai. Kemudian membuat atau mengintruksikan sarana dan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan korban jiwa akibat bencana.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan BPBD Kabupaten Pandeglang Tanpa kolaborasi dengan semua mitra atau pihak yang ada, yang terlibat secara langsung dalam mitigasi dan kesiapsiagaan, hasil yang baik tidak dapat dicapai. Karena bencana merupakan masalah penting yang semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama. Implementasi dari kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pandeglang telah di bentuk satuan tugas Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) Kabupaten Pandeglang yang di isi oleh Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupateni Pandeglang terdiri dari Bupati, DPRD, Kapolres, Dandim, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Danrem. Pendidikan pencegahan bencana di sekolah sangat penting, namun perhatian pemerintah terhadap pendidikan pencegahan bencana di sekolah masih sangat rendah. Bahkan, kalah jauh bila dibandingkan dengan beberapa negara lain yang sudak memasukan pendidikan kesiapsiagaan pada kurikulum di semua tingkatan pendidikan seperti Bangladesh, Iran, India, Mongolia, Filipina, Turki dan Tonga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rusilowati, Supriyadi -, A. Binadja, S. E. S. Mulyani, Jurnal Vol 8, No 1 2012. Mitigasi Bencana Alam Berbasis Pembelajaran Bervisi Science Environment Technology And Society

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2013 indeks risiko bencana Indonesia (IRBI)

IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) Tahun 2013 di terbitkan okeh Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Laporan Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat (UNESCO-LIPI) TIC UNESCO, 2006

Nurjanah, 2012, *Manajemen bencana,* Jakarta : Alfabeta

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Pandeglang

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang

PERKA (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana) BNPB No. 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah, Madrasah Aman Dari Bencana

PERKA (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana) BNPB No 17 Tahun 2009 Pedoman Standarisasi Peralatan Penaggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Ulum Mochamad, 2013, Governance dan Capacity Building Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Indonesia, *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 4(2)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana